

# Rencana Kinerja Tahunan (RKT)



**DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan INPRES Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan.

Sebagai realisasi tugas dan fungsi tersebut, maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang mampu menterjemahkan tugas dan fungsi dimaksud. RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi untuk mencapai tujuan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2020.

Dengan disusunnya RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Padang,           Maret 2020  
KEPALA DINAS KEHUTANAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



YOZARWARDI U.P. S.Hut. M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN .....	3
A. Visi .....	3
B. Misi .....	3
C. Tujuan .....	3
D. Sasaran .....	4
BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM DAN KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2019.....	6
A. Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran.....	6
B. Program dan Kegiatan.....	7
BAB IV PENUTUP.....	17
LAMPIRAN.....	18
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 .....	18

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban Renstra kepada masyarakat dapat dilihat dari dua jalur utama, yaitu jalur pertanggungjawaban keuangan dan jalur pertanggungjawaban kinerja. Rambu-rambu jalur pertanggungjawaban keuangan dan kinerja tersebut di atas sudah tertata dengan baik.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai instansi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dengan mengacu pada Revisi Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 dan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan.

## B. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah memberi acuan bagi pelaksana kegiatan di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan tugas pokoknya terkait melaksanakan urusan pemerintah daerah bidang kehutanan pada tahun berjalan.

## II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

### A. VISI

Berdasarkan arahan umum kerangka pembangunan jangka panjang daerah (RPJP) untuk RPJM ke-4, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat, maka visi Kepala Daerah terpilih Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 adalah: Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera.

### B. MISI

Untuk mewujudkan visi di atas, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dari kelima misi diatas yang menjadi tanggungjawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah misi kelima.

### C. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi kelima yang menjadi tanggung jawab Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat maka Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 1. berikut:

Tabel 1. Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu 2016-2021

No.	Tujuan Organisasi Awal	Tujuan Organisasi Setelah Evaluasi Kementerian PAN-RB	Tujuan Organisasi sesuai Arahan KemenPAN-RB Oktober 2018
1.	Memberikan Kepastian dalam Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Sesuai dengan Fungsi dan Peruntukannya	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
2.	Memulihkan daya dukung hutan dan lahan serta memastikan terjaganya sumber daya hutan sesuai fungsi dan peruntukannya sehingga dapat berfungsi secara optimal	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.	Meningkatnya Kinerja Organisasi.
3.	Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya hutan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	
4.	Memberikan akses masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan hutan melalui kemitraan,	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	

#### D. SASARAN

Berdasarkan tujuan tersebut selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta RPJMD Sumatera Barat 2016-2021. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode 2016-2021 adalah pada Tabel 2. berikut ini.

Tabel 2. Tujuan, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Sasaran Periode 2016-2021 setelah revisi dari Menpan

No	Tujuan	Tujuan sesuai Arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun n					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan produktivitas dan pengelolaan hasil hutan lestari.	1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100	100	100	100	100	100
				Persentase pencapaian target produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu	%	80	81	82	-	-	-
				Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sector kehutanan	%	80	81	82	83	84	85
					%						
2.	Meningkatkan kemampuan hutan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan fungsinya.		Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan luas lahan kritis	%	0,18	0,43	1,09			
				Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	-	4,15	-	-	-	-
					%	-	-	10	12	14	15
				Persentase penurunan jumlah titik panas (hot spot) dari rerata angka periode tahun sebelumnya (2011-2015)	%	5	10	-	-	-	-
%	-	-	45		50	55	60				
3.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan		Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	Persentase luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	5.32	8.50	11.68	14.86	18,03	21.21
4.	Terwujudnya	2. Meningkatnya Kinerja Organisasi.	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
				Persentase capaian realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	95%	95%	95%	95%	-	-	-

### III. KEBIJAKAN, STRATEGI, PROGRAM/KEGIATAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2019

#### A. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan kehutanan di Provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan Tahun 2021 adalah tahun keenam untuk Renstra Dinas Kehutanan periode Tahun 2016-2021 yang lebih rinci sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Tujuan sesuai arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Indikator Tujuan sesuai arahan MenPAN-RB Oktober 2018	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun 2021
1.	1.Meningkat nya Kualitas Lingkungan Hidup	1.Persentase penurunan lahan kritis 2.Persentase penurunan jumlah titik panas (hotspot)	Terwujudnya Optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya	%	100
				Optimalisasi PNPB sektor kehutanan	%	85
			Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	Persentase penurunan laju kerusakan hutan	%	15
			Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan	Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	%	21,21
	2.Meningkatnya Kinerja Organisasi.	3.Nilai Evauasi Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	BB

Sumber: Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

## B. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam implementasinya Rencana Kinerja Sasaran diatas akan dicapai dengan melaksanakan Program Pembangunan Kehutanan maupun Program Pendukung lainnya yang terdiri dari Kegiatan-kegiatan Pembangunan Kehutanan maupun kegiatan Pendukung sehingga Pencapaian Kinerja Sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Kinerja Kegiatan. Secara ringkas Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 yang akan dicapai adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Kehutanan Tahun 2021

Uraian	Jumlah Anggaran
<b><u>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</u></b>	<b><u>53,342,726,281</u></b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	450,000,000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450,000,000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	40,836,294,429
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,440,751,704
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13,104,939
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	141,000,000
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	570,465,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	<b>637,500,000</b>
A.DINAS INDUK	177,000,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	58,500,000
D. UPTD 50 KOTA	55,500,000
E.UPTD AGAM RAYA	40,500,000
F.UPTD KPHL BB	94,500,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	46,500,000
H. UPTD KPHL SOLOK	49,500,000
I. UPTD KPHL HBH	31,500,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	28,500,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	31,500,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	24,000,000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	234,004,700
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	150,000,000
A.DINAS INDUK	78,720,000
B. UPTD BSPTH	6,480,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	6,480,000
D. UPTD 50 KOTA	6,480,000
E.UPTD AGAM RAYA	6,480,000
F.UPTD KPHL BB	6,480,000

G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	6,480,000
H. UPTD KPHL SOLOK	6,480,000
I. UPTD KPHL HBH	6,480,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	6,480,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	6,480,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	6,480,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>300,000,000</b>
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<b>520,000,000</b>
A.DINAS INDUK	233,789,600
B. UPTD BSPTH	25,006,400
C. UPTD PASAMAN RAYA	26,120,400
D. UPTD 50 KOTA	26,120,400
E.UPTD AGAM RAYA	26,120,400
F.UPTD KPHL BB	26,120,400
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	26,120,400
H. UPTD KPHL SOLOK	26,120,400
I. UPTD KPHL HBH	26,120,400
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	26,120,400
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	26,120,400
L. UPTD KPHP MENTAWAI	26,120,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	250,000,000
A.DINAS INDUK	152,694,000
B. UPTD BSPTH	8,846,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	8,846,000
D. UPTD 50 KOTA	8,846,000
E.UPTD AGAM RAYA	8,846,000
F.UPTD KPHL BB	8,846,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	8,846,000
H. UPTD KPHL SOLOK	8,846,000
I. UPTD KPHL HBH	8,846,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	8,846,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	8,846,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	8,846,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60,000,000
A.DINAS INDUK	44,160,000
B. UPTD BSPTH	1,440,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	1,440,000
D. UPTD 50 KOTA	1,440,000
E.UPTD AGAM RAYA	1,440,000
F.UPTD KPHL BB	1,440,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	1,440,000
H. UPTD KPHL SOLOK	1,440,000
I. UPTD KPHL HBH	1,440,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	1,440,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	1,440,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	1,440,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	482,374,000
Pengadaan Mebel	300,000,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	120,000,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<b>1,072,070,186</b>
A.DINAS INDUK	409,739,786
B. UPTD BSPTH	76,434,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	64,561,200
D. UPTD 50 KOTA	60,414,000
E.UPTD AGAM RAYA	54,496,800
F.UPTD KPHL BB	84,552,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	63,279,600
H. UPTD KPHL SOLOK	62,772,000
I. UPTD KPHL HBH	21,720,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	65,770,800
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	63,978,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	44,352,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<b>2,032,826,613</b>
A.DINAS INDUK	623,609,150
B. UPTD BSPTH	43,187,950
C. UPTD PASAMAN RAYA	140,534,600
D. UPTD 50 KOTA	140,534,600
E.UPTD AGAM RAYA	140,534,600
F.UPTD KPHL BB	233,381,250
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	140,534,600
H. UPTD KPHL SOLOK	140,534,600
I. UPTD KPHL HBH	140,534,600
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	140,534,600
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	140,534,600
L. UPTD KPHP MENTAWAI	136,034,600
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	816,144,250
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<b>2,283,570,460</b>
A.DINAS INDUK	1,985,978,860
B. UPTD BSPTH	10,082,800
C. UPTD PASAMAN RAYA	28,808,000
D. UPTD 50 KOTA	21,606,000
E.UPTD AGAM RAYA	10,082,800
F.UPTD KPHL BB	59,056,400
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	36,010,000
H. UPTD KPHL SOLOK	28,808,000
I. UPTD KPHL HBH	59,925,600
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	10,082,800
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	23,046,400
L. UPTD KPHP MENTAWAI	10,082,800
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182,620,000

<b>PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN</b>	<b>23,109,285,709</b>
Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	<b>1,933,302,000</b>
A.DINAS INDUK	425,248,300
C. UPTD PASAMAN RAYA	124,601,800
D. UPTD 50 KOTA	117,353,800
E.UPTD AGAM RAYA	103,410,800
F.UPTD KPHL BB	288,925,600
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	130,277,550
H. UPTD KPHL SOLOK	142,768,800
I. UPTD KPHL HBH	124,568,800
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	118,514,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	109,863,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	247,769,550
Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	340,000,000
Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH (DBH-DR)	700,000,000
Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	390,845,209
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung	<b>1,430,000,000</b>
A.DINAS INDUK	630,000,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	110,000,000
D. UPTD 50 KOTA	110,000,000
E.UPTD AGAM RAYA	50,000,000
F.UPTD KPHL BB	130,000,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	40,000,000
H. UPTD KPHL SOLOK	60,000,000
I. UPTD KPHL HBH	40,000,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	40,000,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	50,000,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	170,000,000
Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH (DBH-DR)	50,000,000
Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan	200,000,000
Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL) (DBH-DR Rp.150.000.000)	245,000,000
Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	<b>5,777,360,000</b>
A.DINAS INDUK	504,164,600
C. UPTD PASAMAN RAYA	231,510,000
D. UPTD 50 KOTA	681,016,200
E.UPTD AGAM RAYA	734,531,200
F.UPTD KPHL BB	1,081,679,400
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	852,551,200
H. UPTD KPHL SOLOK	1,157,907,400
I. UPTD KPHL HBH	200,000,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	334,000,000

Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan (DAK	<b>1,024,056,000</b>
D. UPTD 50 KOTA	224,743,200
F.UPTD KPHL BB	231,026,400
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	193,617,600
H. UPTD KPHL SOLOK	374,668,800
Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan (UPTD BSPTH) (DAK 400.000.000, DBH 225.000.000)	1,275,000,000
Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	<b>558,347,000</b>
A.DINAS INDUK	397,345,000
D. UPTD 50 KOTA	44,149,300
E.UPTD AGAM RAYA	26,329,300
F.UPTD KPHL BB	32,524,300
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	22,669,300
H. UPTD KPHL SOLOK	35,329,800
Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan	<b>5,006,001,000</b>
A.DINAS INDUK	2,968,501,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	175,000,000
D. UPTD 50 KOTA	175,000,000
E.UPTD AGAM RAYA	175,000,000
F.UPTD KPHL BB	375,000,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	175,000,000
H. UPTD KPHL SOLOK	175,000,000
I. UPTD KPHL HBH	175,000,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	175,000,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	175,000,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	262,500,000
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	<b>3,114,600,000</b>
A.DINAS INDUK	2,495,000,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	58,000,000
D. UPTD 50 KOTA	58,000,000
E.UPTD AGAM RAYA	58,000,000
F.UPTD KPHL BB	90,000,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	58,000,000
H. UPTD KPHL SOLOK	58,000,000
I. UPTD KPHL HBH	58,000,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	58,000,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	58,000,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	65,600,000
Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya	964,774,500
A.DINAS INDUK	433,118,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	51,568,000
D. UPTD 50 KOTA	41,645,000
E.UPTD AGAM RAYA	51,568,000
F.UPTD KPHL BB	44,321,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	42,989,500
H. UPTD KPHL SOLOK	41,645,000
I. UPTD KPHL HBH	41,645,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	41,645,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	41,645,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	132,985,000

Sertifikasi Mutu Bibit (UPTD BSPTH)	50,000,000
Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit (UPTD BSPTH)	50,000,000
<b><u>PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA</u></b>	<b>561,900,000</b>
Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	<b>561,900,000</b>
A.DINAS INDUK	361,900,000.00
F.UPTD KPHL BB	200,000,000.00
<b><u>PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN</u></b>	<b>9,413,674,688</b>
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan	550,717,260
Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	<b>1,816,000,000</b>
A.DINAS INDUK	900,000,000
C. UPTD PASAMAN RAYA	120,000,000
D. UPTD 50 KOTA	90,000,000
E.UPTD AGAM RAYA	120,000,000
F.UPTD KPHL BB	120,000,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	90,000,000
H. UPTD KPHL SOLOK	90,000,000
I. UPTD KPHL HBH	90,000,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	90,000,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	30,000,000
L. UPTD KPHP MENTAWAI	76,000,000
Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	<b>7,046,957,428</b>
A.DINAS INDUK	2,896,957,428
C. UPTD PASAMAN RAYA	900,000,000
D. UPTD 50 KOTA	400,000,000
E.UPTD AGAM RAYA	600,000,000
F.UPTD KPHL BB	450,000,000
G. UPTD KPHL SIJUNJUNG	700,000,000
H. UPTD KPHL SOLOK	300,000,000
I. UPTD KPHL HBH	200,000,000
J, UPTD KPHP DHARMASRAYA	300,000,000
K. UPTD KPHP PESISIR SELATAN	300,000,000
<b><u>PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)</u></b>	<b>712,000,000</b>
Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	712,000,000

Sumber: Rencana Kerja (Renja) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

## BAB IV. PENUTUP

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 merupakan penjabaran dari visi, misi Pembangunan kehutanan Sumatera Barat dan bagian dari Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021 serta Rencana Straregis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat 2016 - 2021.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021 merupakan pedoman/acuan bagi unit kerja lingkup Dinas Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja tahun 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Unit Kerja lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Sumatera Barat berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan yang termuat di dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dengan target, tolok ukur dan indikator kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel mengacu pada RKT Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 dengan sebaik-baiknya.
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kehutanan berkewajiban menjamin konsistensi serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat sesuai RKT yang telah ditetapkan.

## RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD : DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan	a. Persentase pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan yang sesuai dengan fungsi dan peruntukannya b. Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan	100% 85%
2.	Daya dukung dan daya tampung hutan meningkat	a. Persentase penurunan laju kerusakan hutan	15 %
3.	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan meningkat	a. Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	21.21%
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi	a. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB

Padang, Maret 2020  
Kepala Dinas Kehutanan



**YOZARWARDI U.P. S.Hut, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690406 199701 1 002